Journal Politique
e-ISSN 2829-5323
Volume 2, Number 2, July 2022, 160-170
https://doi.org/10.15642/politique.2022.2.2.160-170

IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA

Diana Permatasari Oktaviani
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email:DPO604130@gmail.com

Abstrak

Kebijakan bantuan sosial ada beberapa bentuk ada bantuan sosial tunai, bantuan berupa sembako dan program keluarga harapan bantuan- bantuan ini pasti memiliki tujuan yaitu membantu mensejahterahkan masyarakatnya dan focus utama pada skripsi ini yaitu kebijakan bantuan sosial tunai dan bantuan itu berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000 yang diberikan secara langsung di kantor pos yang terpiih dimasing- masing kelurahan. Lalu Penelitian tentang Implementasi Bantuan Sosial Tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir Kota Surabaya bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi bantuan social tunai dan menganalisis factor- factor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan bantuan social tunai di kecamatan Semampir. Penelitian menggunakan metode kualitatif kerena pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam melihat fenomena yang terjadi pada implementasi kebijakan public menurut Van Metter dan Carl Van Horn. Implementasi dari bantuan social tunai ini berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian data, pembagian kartu, pencairan dana dan pembuatan laporan. Factor pendukung dari keberhasilan terdapat pada pencairan dana dengan sumber daya manusia yang cukup menjadikan penyaluran dana terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan factor penghambat dari implementasi tersebut pada terletak pada sosialisasi yang tidak merata jadi ada warga yang tidak mendapat bantuan sosial tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan sosial tunai.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 banyak sekali negara yang terkena wabah dari virus corona termasuk negara Indonesia, karena adanya sebuah wabah penyakit ini banyak sekali dampak yang terjadi di masyarakat khususnya dampak ekonomi yang menjadikan tingkat kemiskinan semakin tinggi dan pengeluaran pemerintah pun semakin banyak karena pengeluaran tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial, salah satu program pemerintah yaitu bantuan sosial tunai yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Dalam program bantuan sosial

Copyright: © 2022

tunai pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan supaya bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

Berbicara tentang kemiskinan di indonesia pada badan pusat statistic (BPS) persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen point terhadap maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2020, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, menigkat 1,13 juta orang terhadap maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2020, persentase miskin perkotaan pada maret 2020 sebesar 7,38 persen naik menjadi 7,88 persen pada September 2020 sementara persentase penduduk miskin pedesaan pada maret 2020 sebesar 12,82 persen naik menjadi 13,20 persen pada September 202, jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,16 juta orang pada maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020) sementara itu jumlah penduduk miskin diperdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 15,26 juta orang pada maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020).

Pada badan Pusat Statistik 2020 di Jawa Timur jumlah kemiskinan pada tahun 2017 yaitu 4.617,01 dengan persentase 11,77 persen lalu pada tahun 2018 menjadi 4.332,59 denan persentase 10,98 persen dan pada tahun 2019 jumlah kemiskinan yaitu 4.112,25 dengan persentase 10,37. Sedangkan kemiskinan ditingkat kota Surabaya pada tahun 2017 yaitu berjumlah 154,71 dengan persentase 5,39 persen lalu pada tahun 2018 berjumlah 140,81 dengan persentase 4,88 persen dan pada tahun 2019 menjadi 130,55 dengan persentase 4,51 persen.

Dalam penelitian ini mengambil satu wilayah yang menjadi salah satu kecamatan miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah di kota Surabaya yaitu kecamatan semampir hal ini dikarenakan factor dari urbanisasi dari utara kota Surabaya, para pendatang tertarik pada kawasan semampir ini karena di kecamatan semampir memiliki peran penting dibidang pelayanan pergudangan dan perindustrian yang membuat tingkat perekonomian semakin tinggi, tingginya tingkat perekonomian membuat semakin padatnya kawasan kecamatan semampir karena banyaknya para pendatang yang mencoba peruntungan bekerja di kawasan semampir.

Dengan adanya kebijakan dari pemerintah dengan dimunculkan sebuah program bantuan sosial untuk masyarakat diharapakan program tersebut bisa membantu memperbaiki perekonomian di Indonesia khususnya pada kecamatan semampir

Bantuan sosial tunai ini adalah sebuah program dari kebijakan pemerintah yang terdapat pada kepetusan Menteri No 54 tahun 2020 tentang pelaksaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak Covid-19. Karena itu peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan bantuan sosial tunai mulai dari sosialisasinya bagaimana, verifikasi datanya, pembagian undangan dari kantor pos seperti apa prosesnya, pencairan dananya serta pelaporannya semua bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut yang menjadi focus penelitian serta factor pendukung dan pendorong apasaja yang ada pada implementasi kebijakan tersebut.

KERANGKA DAN METODE RISET

Telaah pustakan

Implementasi dalam kamus webster (dalam wahab,1997;64) dirumuskan secara pendek bahwasannya mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal. Menurut Anderson (dalam Islamy,2001:17) yang dimaksud kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku untuk memecahkan sesuatu masalah tertentu. Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi kebijakan menurut mereka dimaknai dengan beberapa kata kunci yang pertama untuk menjalankan sebuah kebijakan, untuk melengkapi sebuah janji- janji dari sebuah kebijakan, untuk menghasilkan out put dari sebuah tujuan kebijakan , untuk menyelesaikan misi yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah tujuan kebijakan. menurut Marshall yaitu sebuah kebijakan dari pemerintah yang berhubungan dengan suatu tindakan yang mempunyai dampak secara langsung terhadap suatu kesejahteraan masyarakat disuatu negara melalui penyediaan pelayaan sosial atau bantuan berupa keuangan.
Bantuan sosial tunai merupakan varian dari jarring pegaman di negara maju, mencakup 80 persen dari polulasi negara- negaraindustri menurut data ILO. Hanya sedikit sekali program bantuan tunai dilaksanakan dinegara- negara berkembang dan hanya

memberikan bantuan yang minim. Bantuan sosial tunai adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan berupa bantuan langsung berupa uang tunai

penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan public menurut donal van meter dan carl van horn yang dikutip dalam Leo agustino terdapat enam variable mempengaruhi kinerja kebijakan public diantaranya:

1. Standar/ ukuran tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi
4. Disposisi implementer
5. Karakter lembaga pelaksana
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Metode

Erickson (1968) juga meyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan dengan cara naratif kegiatan atau tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan.Dengan judul Implementasi Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Termasuk dalam jenis penelitian kualitatif karena penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau metode kuantitaifikasi tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian di interpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman berkaitan dengan masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan realitas atau bisa disebut dengan natural setting yang holistis, kompleks dan rinci. Dan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif karena mendeskripsikan fenomena yang ada**.** kebutuhan data

informan penelitian dipilih secara *purposive sampling. Purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan dari penelitian. Arikuto menyatakan bahwa purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti saat peneliti mempunyai pertimbangan tertentu di saat melakukan pengambilan sampel. teknik dalam mengumpulkan suatu data untuk melihat secara nyata suatu realita yang mencakup variable yang akan diteliti. Data yang didapat pada saat turun

lapangan adalah hasil wawancara yang berupa rekaman , dokumentasi foto dan catatan yang ditulis secara langsung pada saat wawancara saat bertanya kepada informan.

Teknik Pemerikasaan Kebsahan Data Dalam penelitian yang sudah dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berguna untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Teknik triangulasi yakni sebuah teknik untuk memerikasa data dengan menggunakan data terkait dengan kenyataan yang diperoleh. Lebih jelas lagi penulisan akan meggunakan teknik umum yang biasa dipakai dari berbagai penelitian. Triangulasi data ini dipublikasikan dengan cara menghubungkan hasil wawancara yang didapat dengan data dokumentasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemic Covid -19 Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Kebijakan yakni sebuah rangkaian perilaku atau tindakan yang mencakup konsekuensi yang memang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang maupun kelompok atau pemerintah yang memang berisikan sebuah keputusan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi kebijakan menurut mereka dimaknai dengan beberapa kata kunci yang pertama untuk menjalankan sebuah kebijakan, untuk melengkapi sebuah janji- janji dari sebuah kebijakan, untuk menghasilkan out put dari sebuah tujuan kebijakan , untuk menyelesaikan misi yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah tujuan kebijakan.

Teori Implementasi Van meter dan van horn menyatakan bahwa suatu proses implementasi mewujudkan abstarksi atas dikeluarkannya suatu kebijakan yang pada dasarnya dilaksanakan untuk mendapatkan bentuk kinerja pelaksanaan kebijakan yang baik dalam hubungan variable- variable tertentu dan menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut. model ini mengindikasikan bahwa kebijakan bejalan sesuai dengan adanya suatu keputusan politik, yang menjadi pengaruh dalam kinerja kebijakan public dipengaruhi oleh beberapa hal yakni, ukuran tujuan, sumber daya, komunikasi, disposisi implementor, karakter lembaga, kondisi sosial, ekonomi serta politik.

a. Standar atau Ukuran Tujuan Kebijakan

Kebijakan bantuan sosial tunai ini memang program dari pemerintah pusat yang berbentuk keputusan menteri sosial No 54 tahun 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penangan dampak corona virus Disease 2019 (covid-19), sesuai dengan penjelasan dari Van metter dan Van Horn yang menyatakan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan adanya suatu keputusan politik dan begitulah muncul keputusan menteri sosial terkait bantuan sosial tunai tersebut. bisa dibilang kebijakan bantuan sosial ini sudah berjalan sesuai keputusan menteri yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak dari covid -19 dan berjalannya kebijakan tersebut juga ada kendala atau permasalahan dalam kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Dalam hal ini ada 3 sumber daya yaitu manusia, anggaran dan sarana prasarana. Dalam hal ini sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pelaksana mulai dari tingkat pusat yaitu kementrian sosial, dinas sosial, kantor pos, kecematan , kelurahan, RW, serta RT bisa dilihat dari masing- masing peranannya para sumber daya manusia tersebut turut andil dan berkomitmen atas tugas yang seharusnya di kerjakan. daya manusia tersebut sangat penting karena ada andil dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan

Sumber daya anggaran atau keungan ini juga sangat penting karena memang bantuannya berupa uang tunai yang anggarannya dari kementerian sosial. Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana yaitu kantor pos yang sangat mempunyai andil yang cukup besar karena sebagai penyalur dana atau bantuan sosial tunai tersebut. kantor pos adalah sarana untuk penyaluran dana bantuan sosial yang berupa uang tunai kepada keluarga penerima manfaat.

c. Sikap para pelaksana

Dalam indicator sikap pelaksana terdapat dua hal yaitu inisiatif dan partisipatif, inisiatif yang dimaksud adalah para perwakilan pelaksana langsung terjun ke penyaluran dana di kantor pos masing- masing wilayah untuk mengetahu kenyataan yang ada di lapangan.

d. **Komunikasi**

Komunikasi memanglah sangat penting, dengan melakukan komunikasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut maka dapat berjalan dengan seimbang, bentuk komunikasi yang dilakukan adalah adanya rapat koordinasi dengan begitu maka komunikasi akan lancar dan informasi terkait dilapangan mudah untuk disampaikan dengan jelas dan akurat.

berbeda dengan komunikasi dengan penerima bantuan yang dilakukan tidak merata yang mengakibatkan ada dana yang tidak tersalur ke orang tersebut tidak ada informasi atau komuniasi yang jelas yang membuat bingung mengapa tidak mendapatkan bantuan yang kenyataannya narasumber merasa layak mendapat bantuan Hal ini terjadi karena komunikasi kepada penerima bantuan kurang maksimal.

e. Karakteristik lembaga pelaksana

Lembaga pelaksana bantuan ada beberapa dari kementerian sosial yang menjadi pusat dari data terpadu kesejahteraan sosial jadi lembaga tersebut yang memberikan data yang kemdian di verivikasi dari struktur terkecil yang meminta data kewarganya yang kemudian di stor untuk memvalidasi bahwa data tersebut sudah benar jadi yang turut andil yaitu mulai dari dinas sosial yang berkoordinasi dengan kantor pos dan struktur politik dari kecamatan keluarahan dan RW/RT masing- masing wilayah. Dari kementerian sosial dan dinas sosial memang karakteristik lembaganya yaitu mengedepankan kepentingan sosial seperti kesejahteraan masyarakat, kantor pos lembaga non pemerintah yang membantu penyaluran dana bantuan hal ini dikarenakan pemerintah percaya bahwa kantor pos mampu menyalurkan dana tanpa adanya kecurangan didalamnya.

f. Llingkungan ekonomi, sosial dan politik

Tingkat kemiskiskinan di kecamatan semampir memang cukup tinggi hal ini karena adanya perpindahan masyarakat desa ke kota yang diharapkan melalui kebijakan bantuan sosial tunai ini membantu masyarakat di kecamatan semampir untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti beras, karena tidak meratanya kebijakan bantuan ini di masyarakat membuat adanya kecemburuan sosial karena pernyataan dari narasumber yang tidak menerima bantuan menyatakan hal ini: ada

sebuah kecemburuan sosial yang menganggap bahwa tidak ada keadilan yang sama dengan penerima bantuan di kawasannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam sebuah implementasi kebijakan, tentu terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat dari suatu implementasi kebijakan public. Factor pendukung implementasi kebijakan public memang harus didukung , dilaksanakan, diterima oleh masyarakat. Kebijakan dikatakan terealisasikan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan jika masyarakat mengikuti dan menaati aturan- aturan yang memang dibuat oleh pembuat kebijakan tanpa adanya hambatan- hambatan yang mengakibatkan suatu kebijakan public tidak optiman.

Yang pertama adalah factor pendukung terlaksananya kebijakan bantuan sosial ini karena para pelaksana mengerjakan tugasnya sesuai petunjuk teknis dimasing-masing instansinya yang membuat terlaksananya sampai pencairan dana yang dilakukan di kantor pos.

Komunikasi yang dilakukan antara pihak pelaksana tetap berjalan dengan semestinya karena masih melakukan komunikasi meskipun rapat daring jadi tetap bisa mengontrol berjalannya kebijakan bantuan sosial tersebut.

Adapun factor penghambat dari kebijakan tersebut karena pada saat verifikasi data, data yang diberikan tidak sesuai karena penerima yang pindah rumah tetapi tidak melakukan konfirmasi di kelurahan karena hal tersebut bantuan tidak bisa dicairkan ke penerima manfaat.

Komunikasi antara pihak pelaksana dengan penerima kurang maksimal yang mengakibatkan ada orang yang seharusnya dapat tetepi malah tidak mendapat bantuan tersebut karena kurangnya sosialisasi ke masyarakatnya. Jadi saat bantuan sudah di implementasikan masih ada warga yang bingung mengapa tidak dapat bantuan padahal layak mendapatkan.

Pada saat penyaluran tidak membawa berkas secara lengkap yang membuat dana tidak bisa disalurkan dan karena pada saat mengambil dana bantuan ke kantor pos tidak mematuhi protocol kesehatan mulai dari tidak memakai masker dan tidak jaga

jarak padahal semua yang terlibat di lapangan tersebut harus mematuhi protocol kesehatan supaya tidak ada yang tertular virus covid-19 ini.

Dilihat dari masalah dan kendala yang dihadapi dalam suatu kebijakan maka kebijakan tersebut belum optimal dalam pelaksanaan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan bantuan sosial tunai pada masa pandemic covid-19 di kecamatan Semampir Kota Surabaya menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sangat relevan dengan permasalahan terkait bantuan sosial tunai di kecamatan Semampir yang di kategorikan dalam beberapa variable yang salimg terkait. Variable- variable tersebuta adalah standar ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik lembaga, komunikasi, sikap para pelaksana/ disposisi, lingkungan ekonomi, sosial serta politik.

Dari standar ukuran yang ada yaitu dilihat dari keptusan menteri sosial No.54 tentang pelaksanaa bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (covid-19), sumberdaya yang dimaksud yaitu manusia yang berati para pelaksana dan sumber dana keuangan supaaya program tetap bisa berjalan dengan semestinya, karakteristik lembaga yang memang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya melalaui kebijakan program bantuan sosial tunai ini, komunikasi antara para pelaksana terus berjalan dengan baik sedangkan komunikasi yang dilakukan kepada para penerima tidak berjalan dengan baik karena masih ada orang yang tidak tau mengenai bantuan sosial tunai ini, sikap para pelaksana yaitu menjalankan tugasnya masing- masing sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ada, kondisi sosial ekonomi yaitu adanya kecemburuan sosial saat tidak menerima bantuan karena merasa pantas mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Upaya yang diberikan dalam memberikan bantuan ini yaitu untuk membantu masyarakat yang terkena dampak dari adanya virus corona disease 2019 (covid-19) dengan memberikan bantuan sosial tunai sesuai dengan keputusan kementerian sosial diharapkan bantuan tersebut bisa membantu untuk memenuhi kebutuhuan dasar atau pokok. Kebijakan bantuan sosial tersebut pun memang mempunyai tujuan yang baik di bidang kesejahteraan masyarakatnya.

Factor pendukung dan pendorong hal yang mendorong terlaksananya program ini yaitu para pelaksana program tetap bekerja sesuai dengan standar operasional prosedurdan komunikasi yang dibangun antar pelaksana tetap berjalan meskipun melalui online tetap bisa melakukan rapat kerja.

Dalam hal ini tidak semudah dalam pelaksanaanya karena ada tahap- tahap dalam menerima bantuan sosial tersebut dari verifikasi data pembagian undangan pencairan dana dan pembuatan laporannya terkait tahapan- tahapan tersebut pasti ada kendala yang terjadi mulai dari verifikasi datanya yang tidak sesuai dengan KTP karena alasan pindah rumah tanpa konfrmasi ke pihak kelurahan, pembagian undangan juga sama ada kendala saat penerima pindah rumah karena hal tersebut maka bantuan tidak bisa disalurkan dan kendala dilapangan saat penyaluran dana yang tidak membawa berkas yang menjadi syarat pengambilan hal tersebut yang menjadikan implementasinya tidak optimal tetapi tetap berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2009) *Dasar- Dasar kebijakan Publik* Bandung:Alfabeta.

Agus, E,. dan Dyah Ratih Sulistyastuti.(2015). *Implementasi Kebiakan publik:Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia,*Yogyakarta:Gava Media

Anggito, A. dan Johan Setiawan.(2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat:CV Jejak..

Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Unair Press.

Dwijowijoto, R.N.(2003) *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Haryanti, N.D.(2015) "*implementasi bantuan langsung tunai (BLT) di kecamatan TanjungPinang Barat kelurahan Bukit Cermin Kota TanjungPinang Tahun 2012",* mahasiswa pemerintahan, fisip umrah, TanjungPinang

Iping, B.(2020). Perlindungan social melalui kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) di era pandemic covid-19: tinjauan prespektif ekonomi social", publikasi oleh Universitas Ekasakti padang, *Jurnal maanajemen pendidikan dan ilmu social , Volume 1, Issue 2*.

Islamy, M.I.(2018). *Kebijakan Publik* . Banten: Universitas terbuka.

Islamy, M.I. (2001), *Prinsip- Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara,* Jakarta: Bumi Aksara.

Iqbal, H.(2008). *Implementasi kebijakan Program bantuan langsung tunai tahun 2008 dikabupaten kudus,*universitas Diponogoro semarang.

kariono, J. (2013). implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2008 di kabupaten Aceh Timu"r, *Universitas Sumatera utara (USU) medan Vol 3, No. 1.*

Moeloeng, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kulitatif. Bandung*: PT remaja Rosdakarya

Moleong, L.J.(2018) *metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nasution. (2003) *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Normanda, R., dan Diah Rahmawati.(2013), Identifiksi Faktor Penyebab Kemiskinan Kota Di Kecamatan Semampir Surabaya, *Jurnal Teknik POMITS Vol. 2, No. 1.*

Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Purwanto, E.A.dan Dyah Ratih Sulistyastuti.(2015). *Implementasi Kbeijakan Publik* Yogyakarta: Gava Media

Rahmat, J. (2000). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung:Remaja Rodakarya

Sarpano. (2020). *Bantuan Sosial Tunai kementerian Sosial bagi kelarga terdampak Cocid-19,* (Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial,2020.

Soekanto, S. (1983) *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Rineke Cipta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,* Kualitatif, dan RAD. Bandung:Alfabeta

Suharto,E.(2020). *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta)

Suharto, E.(2020). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial.* Bandung: Alfabeta.

susanti, S.(2016) Implementasi instruksi presiden republic Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) dikelurahan Sambutan kecamatan sambutan kota samarinda. *ejournal ilmu administrasi negara , 4, (2) 2016: 2795-2808, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id.*

Syafi'I, A. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Surabaya:Elkaf.

Wahab,S.A(2001). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*,edisi 2 Jakarta:Bumi Aksara.

Peraturan perundang- undangan

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54 Tahun 2020.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016.